

Analisis Komparabilitas Antara PSAK 109 dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 1 dan 2

Diah Aryati Prihartini
Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma
*diah_aryati@staff.gunadarma.ac.id

*Corresponding Author

Submit : 22 Nov 2025 | Diterima : 15 Des 2025 | Terbit : 18 Des 2025

ABSTRACT

This research analyzes the Indonesian Banking Accounting Guidelines Books 1 and 2, as there have been many changes in accounting regulations within the banking industry. This change is important to discuss because it affects accounting practices in the banking industry, particularly in terms of risk management and financial statement preparation. Comparative descriptive analysis, along with a qualitative approach, was used in this study. This data was collected from banking regulations, Bank Mega Syariah's financial statements, and relevant accounting standards. The analysis method used compares old and new practices in the categorization of financial assets, measurement, and how these impact financial statements. Studies show that the implementation of PSAK 109 significantly changes credit loss provisions (CKPN); this differs from PAPI, which is more conservative in recognizing credit risk, requiring banks to calculate provisions based on long-term loss expectations. Despite some difficulties in adjusting its risk recording and measurement system, Bank Mega Syariah has begun to adopt PSAK 109. It is hoped that this research will assist academics, banking practitioners, and regulators in understanding the impact of the transition to banking accounting standards and provide a reference for further research on how it affects bank financial performance.

Keywords: PASK 109, Indonesian Banking Accounting Guidelines, Books 1 and 2

PENDAHULUAN

Pedoman Buku 1 dan Buku 2 Akuntansi Perbankan di Indonesia diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2004. Penerbitan pedoman ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pelaporan akuntansi perbankan, serta meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam praktik akuntansi di sektor perbankan. Buku 1 fokus pada prinsip dasar akuntansi perbankan, sedangkan Buku

2 lebih mendalam mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan bank. Tujuan dibuatnya laporan keuangan akan bermanfaat jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut mudah untuk dipahami, relevan, dan dapat diperbandingkan. Tetapi perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang tidak keberpentingan bank. PSAK 109 mengacu pada IFRS 9 dan harus diganti dengan PSAK 55 yang lebih dulu diterapkan di akuntansi Indonesia. PSAK 109 memang membahas tentang instrumen keuangan namun secara rinci, PSAK 109 mengatur secara terpisah klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, penurunan nilai dan persyaratan lindung nilai. Berdasarkan standar akuntansi baru ini, artinya, korporasi harus menyediakan cadangan kerugian atas penurunan nilai kredit (CKPN) untuk semua kategori kredit atau pinjaman, baik itu yang berstatus lancar (*performing*), ragu-ragu (*underperforming*), maupun macet (*non-performing*). Imbasnya, korporasi mesti menyediakan nilai pencadangan atas kredit atau piutang tak tertagih lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Adanya penerapan PSAK 109 merupakan respon atas krisis keuangan yang terjadi pada

tahun 2008 di mana banyak debitur perbankan yang mengalami gagal bayar. Pada tahun tersebut, pencadangan penurunan nilai dilakukan terlalu lambat dan terlalu kecil sehingga bank tidak siap dalam menghadapi peningkatan risiko gagal bayar. Hal tersebut akhirnya mengganggu kestabilan keuangan perbankan dan bahkan likuiditas perbankan. Maka buku 1 dan buku 2 dicabut digantikan oleh PSAK 109 yang bermaksud untuk membuat cadangan kerugian atas debitur yang gagal bayar. PSAK 109 dibuat memberikan pedoman yang lebih rinci terkait pengukuran dan penyajian risiko kredit, sehingga memungkinkan investor dan kreditor untuk lebih memahami profil risiko suatu bank. Secara keseluruhan, penerapan PSAK 109 dan PSAK 109 dalam lembaga keuangan syariah dan lembaga zakat di Indonesia meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat, baik zakat, infaq/sedekah, maupun instrumen keuangan lainnya, untuk menghasilkan laporan yang sesuai standar syariah dan transparan, serta dapat di audit.

STUDI LITERATUR

Pengertian Akuntansi Perbankan

Akuntansi perbankan adalah cabang akuntansi yang melibatkan proses akuntansi yang berhubungan dengan bank dan institusi keuangan lainnya. Ini adalah cabang akuntansi yang berfokus pada produk keuangan dan layanan yang ditawarkan oleh bank. Akuntansi ini mengacu pada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya yang berhubungan dengan lembaga keuangan seperti bank. Oleh karena itu, akuntansi perbankan melibatkan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar akuntansi untuk menyediakan informasi yang berguna untuk manajemen bank, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Pencatatan perbankan juga mencakup proses pelaporan keuangan dan aktivitas lain yang berhubungan dengan bank dan institusi keuangan lainnya. Pencatatan ini melibatkan berbagai proses akuntansi yang berkaitan dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank.

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia

Buku 1: Konsep dan Kebijakan Dasar Akuntansi Perbankan

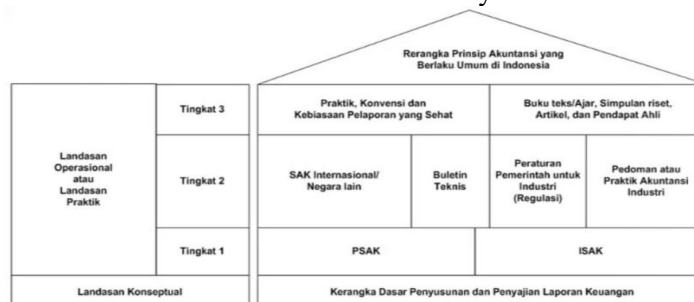
Berdasarkan OJK Buku 1 memberikan landasan teoritis dan pedoman mendasar untuk mencatat dan melaporkan aktivitas keuangan perbankan. Fokus utama buku ini adalah memberikan panduan tentang prinsip-prinsip akuntansi yang relevan untuk perbankan, jenis transaksi umum, dan penyusunan laporan keuangan.

Tujuan dari penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) antara lain adalah:

1. Untuk membantu pengguna dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tinjuannya, yaitu untuk; a) Pengambilan keputusan investasi dan kredit, b) Menilai prospek arus kas, dan c) Memberikan informasi atas sumber daya ekonomi. Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi bank (*economic resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut.
2. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding diantara laporan keuangan bank.
3. Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan dalam menyusun laporan keuangan. Namun keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam PAPI tidak menghalangi masing-masing bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing bank.
4. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding diantara laporan keuangan bank.
5. Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan dalam menyusun laporan keuangan. Namun keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam PAPI tidak menghalangi masing-masing bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing bank.

Ruang lingkup dalam PAPI berlaku untuk bank umum konvensional. Dalam hal bank

umum konvensional mempunyai unit usaha syariah, maka unit usaha syariah tersebut menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tersebut.



Gambar 1. Kerangka Prinsip Akuntansi

Buku 2: Penerapan Praktis dan Studi Kasus Akuntansi Perbankan

Buku 2 PAPI berfokus pada panduan teknis, penerapan praktis, dan studi kasus yang membantu bank menangani situasi nyata di bidang akuntansi perbankan.

a. Penerapan Praktik Akuntansi Perbankan

Buku 2 memberikan panduan untuk mencatat transaksi yang lebih kompleks, seperti:

1) Lindung Nilai (*Hedging*)

- a) Akuntansi untuk kontrak derivatif seperti swap dan futures.
- b) Perlakuan selisih nilai tukar atau suku bunga.

2) Transaksi Valuta Asing (*Forex*)

Pencatatan keuntungan atau kerugian dari pergerakan nilai tukar mata uang.

3) Rekonsiliasi Antar Bank

Penyelesaian dan pencatatan transaksi antar bank.

b. Pengelolaan Risiko Kredit

Buku ini menjelaskan perlakuan akuntansi terkait pengelolaan risiko kredit:

1) Klasifikasi Risiko Kredit

Kredit diklasifikasikan ke dalam kategori seperti lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

2) Provisi Kredit

Penghitungan cadangan kerugian kredit (PPA) sesuai dengan standar regulasi.

c. Akuntansi untuk Produk dan Jasa Spesifik

Panduan ini mencakup perlakuan akuntansi untuk produk dan layanan tertentu:

1) Produk Perbankan Syariah

Akuntansi untuk akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah.

2) Derivatif Keuangan

Perlakuan akuntansi untuk kontrak derivatif seperti opsi, swap, dan futures.

3) Sekuritisasi Aset

Panduan untuk pencatatan transaksi sekuritisasi.

d. Studi Kasus dan Contoh Laporan Keuangan

Buku ini menyediakan contoh laporan keuangan dan studi kasus untuk membantu penerapan akuntansi di dunia nyata, seperti:

1) Restrukturisasi kredit bermasalah.

2) Penghitungan penyisihan kerugian.

3) Penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK dan regulasi OJK.

e. Simpanan Atau Dana Pihak Ketiga

Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi adalah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang memenuhi salah satu kondisi diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, yaitu jika: 1) Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, dan 2) Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang

dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short term profit taking) yang terkini merupakan

Tabel 1. Kategori Aset Keuangan

No.	Kategori Aset Keuangan	Keterangan
1.	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	a. Penempatan pada bank lain dengan tujuan untuk dijual kembali dalam waktu dekat, dan atau untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. b. Penempatan pada bank lain yang pada saat diberikan atau dibeli ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (<i>fair value option</i>) meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 55 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan <i>fair value option</i> .
2.	Dimiliki hingga Jatuh Tempo.	Penempatan pada bank lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan. Bank memiliki intensi positif dan kemampuan untuk melakukan penempatan tersebut hingga jatuh tempo.
3.	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.	Penempatan pada bank lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuota di pasar aktif.
4.	Tersedia untuk Dijual	a. Penempatan pada bank lain yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual. b. Penempatan pada bank lain dimana bank mungkin tidak akan memperoleh kembali pokok penempatan tersebut secara substansial, yang bukan disebabkan penurunan kualitas penempatan.

Tabel 2. Penempatan pada Bank Lain Diakui pada Saat Dilakukan Penempatan dan Dapat Diklasifikasikan dalam Beberapa Kategori Aset Keuangan

No.	Kategori Aset Keuangan	Keterangan
1.	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.	a. Penempatan pada bank lain dengan tujuan untuk dijual kembali dalam waktu dekat, dan atau untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. b. Penempatan pada bank lain yang pada saat diberikan atau dibeli ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (<i>fair value option</i>) meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 55 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan <i>fair value option</i> .

Tabel 3. Bank mencatat nilai penempatan pada bank Indonesia

No.	Kategori Aset Keuangan	Keterangan
1.	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penempatan pada Bank Indonesia diakui pada laporan laba rugi.

No.	Kategori Aset Keuangan	Keterangan
2.	Tersedia untuk dijual	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penempatan pada Bank Indonesia diakui secara langsung dalam ekuitas.
3.	Dimiliki hingga jatuh tempo	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai penempatan pada Bank Indonesia yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

Tabel 4. Kategori Kewajiban Keuangan

No.	Kategori Aset Keuangan	Keterangan
1.	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.	Kewajiban kepada bank lain yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (<i>fair value option</i>) meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 55 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan <i>fair value option</i> .
2.	Kewajiban Lainnya (biaya perolehan diamortisasi)	Kategori kewajiban lainnya, apabila tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

METODE

Objek penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah Perbandingan keuangan pada Bank Mega Syariah sebelum PSAK 109 diterbitkan dan sesudah diterbitkan, yang berfokus pada laporan keuangan ditahun 2016 dan ditahun 2020, dan juga perbandingan PSAK 109 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 1 dan Buku 2 yang telah dicabut.

Jenis dan sumber data dalam penulisan ilmiah ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang tidak berupa angka atau data yang bersifat deskriptif dan dapat diamati serta dicatat. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Terdapat beberapa sumber yang dapat digunakan dan diakses melalui:

1. Buku 1 - Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).pdf
2. Buku 2 - Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).pdf
3. <https://web.iaiglobal.or.id/beranda#gsc.tab=0&gsc.sort=>
4. <https://www.megasyariah.co.id/id/tentang-kami/laporan-keuangan> perusahaan/laporan-tahunan

HASIL

Bank Mega Syariah mulai menerapkan PSAK 109 pada 1 Januari 2020, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh IAI. PSAK 109, yang mengadopsi IFRS 9, menggantikan standar sebelumnya dan mengatur pelaporan keuangan terkait instrumen keuangan, termasuk pengukuran, serta klasifikasi aset keuangan. Perbandingan antara PSAK 109 dengan PAPI ini sangat lah signifikan dari piutang dan *Croos Strategy*.

Klafikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keungan

Keterangan	Dalam Juataan Rupiah	
	Tahun 2016	Tahun 2020
Kas	47.948	41.584
Aset	6.135.242	16.117927
Aset Produktif	5.615.404	14.964.218
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia, Bank Lain, dan Efek-Efek yang Dimiliki	945.290	11.150.005

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2020
Piutang Murabahah	-	2.731.750
1. Piutang	-	2.747.334
2. Penyisihan Kerugian	-	(15.584)
3. Pihak Berelasi	32.816	-
4. Pihak Ketiga	4.267.783	-
Pembiayaan Mudharabah	201.463	-
Pembiayaan Musyarakah	1.965.985	-
1. Piutang	-	2.747.334
2. Penyisihan Kerugian	-	21.273
3. Pihak Berelasi	45.893	-
4. Pihak Ketiga	294.325	-
Pinjaman Qardh	-	8.007
1. Piutang	-	8.959
2. Penyisihan Kerugian	-	952
3. Pihak Ketiga	952	-
Aset Ijarah Sewa	-	-
1. Piutang	136	-
2. Penyisihan Kerugian	1.393	-
3. Pihak Ketiga	-	-
Tagihan Akseptasi	-	-
1. Pihak Ketiga	17.223	-
Aset Tetap Neto	324.460	401.802
Aset Pajak Tangguhan	-	-
Aset Lain-Lain	136.571	401.802
Pembiayaan	4.714.812	4.946.543
Liabilitas	653.978	6.602.789
Dana Syirkah Temporer	4.419.464	7.495.888
Dana Pihak Ketiga	4.973.126	-
Pendanaan	-	7.689.022
Giro	254.945	1.009.270
Tabungan	671.773	868.213
Deposito	4.046.408	5.811.539
Ekuitas	1.061.801	2.019.249

Aset dan liabilitas keuangan yang terdapat pada laporan diatas, pada tahun 2016 dan tahun 2020, untuk ditahun 2020 Bank Mega Syariah memperhitungkan risiko kegagalan pembayaran piutang, dan harus menyediakan cadangan kerugian yang cukup sebagai perlindungan atas risiko ini, dan ditahun 2020 Bank Mega Syariah memperkirakan kerugian yang mungkin terjadi (*Expected Loss*). Sedangkan ditahun 2016 Bank Mega Syariah Belum menerapkan *Expected Loss*. Terlihat ditahun 2020 Bank Mega Syariah sudah menerapkan PSAK 109.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Dalam Juataan Rupiah

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2020
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib	660.473	883.299
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	243.703	(382.670)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	416.769	500.630
Pendapatan Operasional Lainnya	502.978	317.915
Beban Usaha	781.973	(664.254)
Laba Usaha	137.775	154.290
Pendapatan NonUsaha – Bersih	13.249	19.032
Laba Sebelum Zakat dan Pajak	151.023	173.322

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2020
Zakat	3.776	(4.333)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	147.248	168.989
Beban Pajak Penghasilan – Bersih	36.518	(37.262)
Laba Bersih Tahun Berjalan	110.729	131.727
Pendapatan Komprehensif Lainnya	(515)	597.342
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	110.214	729.069

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya pada tahun 2016 dan 2020. Hasil laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya ditahun 2016 mencapai Rp 3.315 triliun, bahkan ditahun 2020 sempat ada penurunan mencapai Rp 2.587 triliun, terdapat perbedaan mencapai Rp 728.817 juta.

Tabel 5. Perbedaan PSAK 109 dengan PAPI Buku 1 dan Buku 2

Keterangan	PSAK 109	PAPI Buku 1 dan Buku 2
Piutang	Entitas harus memperhitungkan risiko kegagalan pembayaran piutang, dan harus menyediakan cadangan kerugian piutang yang cukup sebagai perlindungan atas risiko ini.	Dibuku 1 dan dibuku 2 tidak ada.
Klasifikasi Instrumen Keuangan	Instrumen keuangan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori diukur pada: 1. Biaya perolehan diamortisasi 2. Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) 3. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Dibuku 1 dan dibuku 2 tersebut hanya ada Biaya perolehan Diamortisasi, dibuku 1 sama dengan PSAK 109 dengan adaptasi untuk perbankan, dan dibuku 2 sama dengan PSAK 109 disesuaikan untuk produk Syariah. Sedangkan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) dan nilai wajar melalui Penghasilan komprehensif lain (FVOCI) tidak ada dibuku 1 dan dibuku 2 tersebut.
Penurunan Nilai (Impairment).	Menggunakan pendekatan <i>Expected Credit Loss</i> (ECL) yang mencakup estimasi kerugian kredit selama umur aset.	Menggunakan pendekatan yang lebih konvensional, seperti kerugian yang telah terjadi (<i>incurred loss</i>) berdasarkan ketentuan regulator.
<i>Cross Staging</i> .	Pada setiap tanggal pelaporan entitas dapat menilai peningkatan risiko kredit atas instrumen keuangan secara signifikan sejak pengakuan awal. Penilaian tersebut entitas dapat membandingkan risiko gagal bayar instrument keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal.	Dalam kredit <i>executing</i> , selain bertindak sebagai administrator, bank menerima aliran dana masuk (mencatat kewajiban keuangan) dan saat menyalurkan kredit bank menanggung sebagian atau seluruh risiko kredit, untuk itu bank mencatat sebagai aset keuangan (<i>executing</i>) sebesar risiko kredit yang ditanggung.
Akuntansi Lindung Nilai	PSAK 109 menghilangkan persyaratan tes efektivitas 80-125% dan memperkenalkan persyaratan	Hubungan lindung nilai dapat dianggap efektif jika memenuhi persyaratan tes efektivitas 80-125%.

Keterangan	PSAK 109	PAPI Buku 1 dan Buku 2
	yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.	
Pengukuran Kerugian Kredit.	Tahap 1 Kerugian kredit 12 bulan Tahap ke 2 <i>Lifetime</i> ECL untuk peningkatan risiko kredit. Tahap ke 3 <i>Lifetime</i> ECL untuk <i>default</i> .	Tahap 1 dibuku 1 dan dibuku 2 sama dengan PSAK 109, sedangkan ditahap 2 dan ditahap ke 3 dibuku 1 dan dibuku 2 tersebut tidak ada.
Klasifikasi dan pengukuran.	Klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan kini tidak lagi berdasarkan intensi manajemen untuk menjual atau memiliki instrumen keuangan hingga jatuh tempo. PSAK 109 memperkenalkan pengaturan klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik kontraktual arus kas dan bisnis model entitas.	
Regulasi dan Implementasi.	PSAK 109 mengubah penentuan CKPN menjadi <i>expected loss</i> dan <i>forward looking</i> .	Buku 1 Mengikuti kebijakan OJK dan BI, sedangkan buku 2 sama dengan buku 1 yang dibedakan hanya untuk bank Syariah.
<i>Expected Loss</i> .	Perkiraan kerugian yang diantisipasi dalam suatu peristiwa terkait kredit, seperti gagal bayar atau kebangkrutan.	Tidak ada.

PEMBAHASAN

PSAK 109 untuk Penerapan Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah sudah menerapkan PSAK 109 (Instrumen Keuangan) sejak standar ini berlaku pada 1 Januari 2020. Penerapan PSAK 109 merupakan bagian dari kewajiban seluruh lembaga keuangan, termasuk bank syariah, untuk menyelaraskan pelaporan keuangannya dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Bank Mega Syariah telah bekerja sama dengan auditor, konsultan, dan regulator untuk memastikan bahwa penerapan PSAK 109 sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Penerapan ini diharapkan meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan di sektor perbankan syariah.

Pada laporan Keuangan Bank Mega Syariah Terlihat jika ditahun 2020 Bank Mega Syariah memakai keterangan piutang dan penyisihan kerugian, sedangkan ditahun 2016 Bank Mega Syariah tidak memakai Keterangan Piutang dan Penyisihan Kerugian. Ditahun 2020 Bank Mega Syariah sudah memakai PSAK 109 sedangkan ditahun 2016 Bank Mega belum memakai PSAK 109. Ditahun 2020 Bank Mega Syariah memiliki Piutang murabahah yang memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, yang memiliki nilai piutang secara individual diatas Rp10 milyar dan juga memiliki Piutang murabahah yang direstrukturisasi dan yang secara individual memiliki nilai piutang diatas Rp10 milyar. Ditahun 2016 Bank Mega Syariah memiliki piutang murabahah yang CKPN dihitung secara individual, jika piutang murabahah tersebut memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, yang memiliki nilai piutang secara individual diatas Rp 5 milyar. Ditahun 2016 tidak memiliki piutang murabahah direstrukturisasi.

Penurunan Nilai pada Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia

Jika penurunan nilai terjadi pada periode berjalan dan Bank masih memiliki saldo tagihan bunga yang pendapatannya telah diakui pada periode sebelumnya, maka saldo tagihan bunga tersebut dijurnal balik dan bank mengakui kerugian penurunan nilai pada periode berjalan. Jika penurunan nilai terjadi pada periode berjalan dan bank masih memiliki saldo tagihan bunga yang

pendapatannya telah diakui pada periode sebe lumnya, maka saldo tagihan bunga tersebut dijurnal balik dan bank mengakui kerugian penurunan nilai pada periode berjalan., 1) Kerugian penurunan nilai, 2) Pendapatan bunga kredit yang akan diterima, dan 3) Cadangan kerugian penurunan nilai kredit. Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penu runan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamorti sasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi. (PSAK 55: paragraf 66).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah saya buat perbandingan PSAK 109 dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia pencabutan buku 1 dan buku 2 pada Bank Mega Syariah ini yaitu; 1) Perbandingan PSAK 109 dengan PAPI buku 1 dan buku 2 Instrumen keuangan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori diukur pada, a) Biaya perolehan diamortisasi, b) Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dan c) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Sementara itu, di PAPI buku 1 dan buku 2 tersebut hanya ada Biaya perolehan Diamortisai, dibuku 1 sama dengan PSAK 109 dengan adaptasi untuk perbankan, dan dibuku 2 sama dengan PSAK 109 disusaikan untuk produk Syariah. Sedangkan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) dan nilai wajar melalui pengshasilan komprehensif lain (FVOCI) tidak ada dibuku 1 dan dibuku 2 tersebut; dan 2) Bank Mega Syariah sudah menerapkan PSAK 109 dengan menambahkan perkiraan kerugian yang mungkin terjadi (*Expected Loss*) yang diantisipasi dalam suatu peristiwa terkait kredit, seperti gagal bayar atau kebangkrutan dan memperhitungkan risiko kegagalan pembayaran piutang, dan harus menyediakan cadangan kerugian piutang yang cukup sebagai perlindungan atas risiko ini.

REFERENSI

- Akhiruddin Siregar, P., Harahap, A., & Olivia, H. (2023). Menganalisis Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(2), 307-316. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i2.4494>
- Bank Indonesia. (2008). *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Bank Mega Syariah. (2024). *Bank Mega Syariah*. <https://www.megasyariah.co.id/>
- Brilianto, Z. (2021). Pengaruh Penerapan PSAK 109 terhadap Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan Perusahaan (Studi kasus pada Laporan Keuangan PT XYZ). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11), 1–20.
- Husni, M., Apriliani, W. A., & Idayu, R. (2022). Analisis Penerapan PSAK 109 Terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1), 62-81. <https://doi.org/10.46306/vls.v2i1.69>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). *Exposure Draft PSAK 55*. IASB.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *PSAK 109*. Ikatan Akuntan Indonesia. <https://web.iaiglobal.or.id/>
- Ilat, V., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2020). Evaluasi Penerapan PSAK 109 Mengenai Instrumen Keuangan pada PT Sarana Sulut Ventura Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 514-522. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.30178.2020>
- Indrabudiman, A., Rosita, R., & Handayani, W. S. (2022). Efisiensi Bank Umum Konvensional Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 109 dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 150-158. <https://doi.org/10.25273/inventory.v6i2.14259>
- PAPI Tim Penyusun. (2019). *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 2*. Bank Indonesia.
- Ramdani, R. F., & Lelawati, N. (2022). Dampak Implementasi PSAK 109 terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Produktif Perbankan Konvensional Indonesia.

-
- Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 5(2), 113-122.
<https://doi.org/10.24127/jf.v5i2.1011>
- Witjaksono, A. (2017). Dampak ED PSAK 109 Instrumen Keuangan terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan Terkait Kredit. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2(1), 35-48.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3368520>
- Witjaksono, A. (2018). Perbandingan Perlakuan Akuntansi Kredit Menurut PSAK 55, PSAK 109, dan Basel pada Bank Umum. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3, 111-120.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3368478>